

SEKOLAH NEGERI DAN SEKOLAH SWASTA: MONOPOLI DALAM PENDIDIKAN

Hamka

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: hamka1957@yahoo.com

Abstrak: Artikel ini membahas tentang monopoli dalam dunia pendidikan yang terjadi di sekolah negeri dan sekolah swasta. Monopoli dapat diartikan sebagai suatu hak istimewa atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya kekuasaan untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa tertentu. Faktor-faktor eksternal yang dapat menimbulkan adanya peluang atau ancaman bagi organisasi terdiri atas: keadaan pasar, persaingan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan peraturan. Sedangkan faktor-faktor internal menunjukkan adanya keunggulan atau kelemahan organisasi, meliputi: keuangan, produksi, SDM, serta khususnya bidang pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Selain daripada monopoli, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi komersialisasi pendidikan diantaranya; aspek politik, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dengan adanya monopoli pendidikan maka mengakibatkan ideologi kapitalisme mulai merebak di dalam dunia pendidikan yang pada akhirnya lebih mengutamakan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja.

Kata Kunci: Monopoli, Pendidikan, Negeri, Swasta

Abstract: *This article discusses the monopoly in the world of education in state schools and private schools. Monopoly is a privilege or a certain advantage gained by one or more persons or companies, because of their power to carry out a certain business or trade, produce certain goods or services, or control the overall sales production or commodity specific goods or services. The external factors that can lead to an opportunity or a threat to the organization consists of: market conditions, competition, technological, economic, social, cultural, legal, and regulations. While internal factors indicate superiority or weakness of the organization, including: finance, production, human resources, and in particular the areas of marketing which consists of product, price, distribution, and promotion. In addition rather than a monopoly, there are some aspects that affect the commercialization of education diantaranya; the political, cultural, economic, and social aspects. With the monopoly of education, resulting in the ideology of capitalism began to spread in the world of education that ultimately prefers advantage for certain parties.*

Keywords: *Monopoly, Education, State, Private*

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut masyarakat untuk melakukan perubahan sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Peran pengetahuan sangat penting bagi setiap masyarakat yang mau meningkatkan kemampuannya

mengikuti persaingan yang kompetitif dalam krisis multidimensi. Pendidikan dipercaya sebagai alat strategis meningkatkan taraf hidup manusia. Melalui pendidikan, manusia menjadi cerdas, memiliki kemampuan atau skill, sikap hidup yang baik, sehingga

dapat bergaul dengan baik di masyarakat.

Pendidikan menjadi investasi yang memberi keuntungan sosial dan pribadi yang menjadikan bangsa bermartabat dan individunya menjadi manusia yang memiliki derajat. Menurut UNESCO (*United Nations, Educational, Scientific and Cultural Organization*) dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa, tidak ada cara lain kecuali melalui peningkatan mutu pendidikan. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) melalui lembaga UNESCO mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk masa sekarang maupun untuk masa depan, yakni : (1) *learning to know* (penguasaan yang dalam dan luas pada bidang ilmu tertentu), (2) *learning to do* (belajar untuk mengaplikasikan ilmu, bekerjasama dalam team, belajar memecahkan masalah dalam berbagai situasi, belajar berkarya atau mengaplikasikan ilmu yang didapat oleh siswa), (3) *learning to be* (belajar untuk dapat mandiri, menjadi orang yang bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan bersama), (4) *learning to live together* (belajar memahami dan menghargai orang lain, sejarah mereka dan nilai-nilai agamanya).

Keempat pilar pendidikan tersebut menggabungkan tujuan-tujuan *intelligence quotient* (IQ), *emotional quotient* (EQ), dan *spiritual quotient* (SQ). Pendidikan dalam kondisi krisis multidimensi yang berkepanjangan, telah menarik perhatian berbagai pihak

dan bergeser menjadi salah satu pos pengeluaran yang semakin besar sehingga memberatkan sebagian besar anggota masyarakat. Bermunculnya sekolah-sekolah baru menimbulkan fenomena dalam dunia kependidikan. Bentuk dan pendekatan yang digunakan dalam pendidikan semakin berkembang dan kompleks. Tidak hanya pemain-pemain lama yang mengembangkan sekolah, namun juga dari pelaku usaha non kependidikan dan bahkan penyelenggara pendidikan dari luar negeri.

Salah satu masalah pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, antara lain melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kompetensi guru, pengadaan buku, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab II pasal 2 dan 3 yaitu dasar, fungsi, dan tujuan dijelaskan bahwa: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia dengan akhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggungjawab". (UU Nomor 20 th 2003 Bab II).

Sekolah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang berkewajiban mengembangkan potensi siswa semaksimal mungkin dalam berbagai aspek kepribadian, sehingga menjadi manusia yang mampu berdiri sendiri di dalam dan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu diharapkan pendidikan dapat menunjang pembangunan bangsa dalam arti luas. Pendidikan di sekolah diartikan sebagai proses kegiatan terencana dan terorganisir yang terdiri atas kegiatan belajar, kegiatan ini bertujuan menghasilkan perubahan yang positif pada diri siswa. Menurut status, lembaga pendidikan/sekolah terbagi menjadi dua yaitu: sekolah Swasta dan sekolah Negeri. Sekolah Negeri maupun sekolah Swasta memiliki karakteristik mereka sendiri, sehingga dengan karakteristik masing-masing akan menampilkan perbedaan antara yang satu dengan yang lain.

Saat ini baik sekolah Swasta maupun sekolah Negeri berlomba-lomba dan bersaing untuk meningkatkan proses pelayanannya dalam meningkatkan mutu pendidikan yang berkualitas. Sesuatu yang berkualitas memang tidaklah murah. Fasilitas kelas VIP adalah konsekuensi logis dari biaya pendidikan yang mahal di sekolah khususnya sekolah swasta. Fasilitas di sekolah Swasta bisa jadi sangat lengkap. Mulai dari ruangan kelas ber-AC, laboratorium, fasilitas olahraga, hingga halaman

parkir yang luas. Branding sekolah Swasta juga dapat melalui hal ini, karena prinsip sektor Swasta yang mengutamakan pelayanan prima dan kepuasan untuk *customer*-nya. Sedangkan sekolah Negeri memiliki fasilitas yang standar untuk keberlangsungan kegiatan belajar mengajar.

Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga penyedia jasa pendidikan perlu belajar dan memiliki inisiatif untuk semakin meningkatkan kepuasan pelanggan, karena pendidikan merupakan proses yang sirkuler yang saling mempengaruhi dan berkelanjutan. Inisiatif sekolah dimulai dari mencari tahu (riset pasar) kondisi pasar pendidikan, dari berbagai macam segmen yang ada di pasar.

Satuan pendidikan dituntut untuk senantiasa merevitalisasi strateginya, guna menjamin kesesuaian tuntutan lingkungan dan persaingan dengan kekuatan internal yang dimilikinya. Ketidakmampuan suatu satuan pendidikan dalam merespon peluang dan ancaman eksternal, akan mengakibatkan menurunnya daya saing atau terhambatnya pencapaian kinerja satuan pendidikan. Jika hal ini dibiarkan, maka akan mengancam kelangsungan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pada umumnya satuan pendidikan memiliki tujuan, dan untuk mencapainya memerlukan strategi. Strategi merupakan suatu kesatuan rencana yang luas dan terintegrasi yang menghubungkan antara kekuatan

internal organisasi, dengan peluang dan ancaman lingkungan eksternalnya. Strategi dirancang untuk memastikan tujuan organisasi dapat dicapai melalui implementasi yang tepat. Substansi strategi pada dasarnya merupakan rencana. Strategi berkaitan dengan evaluasi dan pemilihan alternatif yang tersedia bagi suatu manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara umum strategi pemasaran jasa pendidikan dalam konteks lembaga pendidikan secara keseluruhan, tidak hanya membutuhkan pemasaran eksternal, tapi juga pemasaran internal untuk memotivasi dosen, guru, karyawan, dan administrator untuk menciptakan keahlian penyedia jasa.

Saat ini pendidikan dimonopoli oleh sekolah-sekolah yang memiliki layanan dan sarana prasarana terbaik bahkan tidak jarang sekolah-sekolah tersebut melahirkan komersialisasi pendidikan yang tentunya untuk masuk dan mengenyam pendidikan di sekolah tersebut harus membutuhkan biaya yang mahal dan dapat dipastikan hanya orang tua yang memiliki dana lebih untuk menyekolahkan anaknya. Dengan demikian sekolah-sekolah yang tidak memiliki pelayanan yang berkualitas tentu akan sedikit tertinggal dibandingkan sekolah yang memiliki pelayanan yang ideal.

Konsep Monopoli Secara Umum

Secara etimologi, monopoli berasal dari bahasa Yunani, yaitu "monos", yang artinya satu atau sendiri, dan "polein" yang artinya

menjual atau penjual. Berdasarkan etimologi monopoli tersebut dapat diartikan bahwa monopoli adalah kondisi dimana hanya ada satu penjual yang menawarkan satu barang dan jasa tertentu (Margono, 2009: 6). Monopoli terbentuk jika hanya ada satu pelaku mempunyai control eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya. Tidak adanya pesaing menjadikan monopoli merupakan pemusatan kekuatan pasar di satu tangan, bila di samping kekuatan tunggal itu ada pesaingpesaing lain namun peranannya kurang berarti, pasarnya bersifat monopolistis.

Tentunya karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam praktiknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada disatu pelaku saja (Margono, 2009: 6). Sebagai perbandingan pengertian monopoli, secara akademis dikutipkan pengertian monopoli berdasarkan Black Law Dictionary dikatakan bahwa;

Monopoly. A privilege or peculiar advantage vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive rights (or power) to

carry on a particular business or trade, manufacture or particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product or services. Natural monopoly is one result where one firm of efficient size can produced all or more than market can take as remunerative prices. (Margono, 2009: 6).

Pengertian monopoli tersebut dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa tertentu. Bentuk dari struktur pasar yang mana satu atau hanya beberapa perusahaan yang mendominasi keseluruhan penjualan atas suatu barang atau jasa. Berbeda dari definisi yang diberikan dalam Undang-Undang yang secara langsung menunjuk pada penguasaan pasar, dalam Black's Law Dictionary, Penekanan lebih diberikan pada adanya suatu hak istimewa (priviledge) yang menghapuskan persaingan bebas, yang tentu pada akhirnya juga akan menciptakan penguasaan pasar. Monopli dapat diartikan sebagai *The market condition existing when only one economic entity produces a particular product or*

provides a particular service (Garner, 1999: 103).

Monopoli organisasi nirlaba (sekolah) sangat berbeda. Perbedaan yang nyata terletak pada cara organisasi dalam memperoleh sumber dana yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasi perusahaan, dengan memperoleh modal pertamanya dari para investor atau pemegang saham. Organisasi nirlaba (sekolah) memperoleh dana dari sumbangan para donatur atau lembaga induk yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut.

Strategi Monopoli: Pemasaran Jasa Pendidikan

Penentuan strategi pemasaran harus didasarkan atas analisis lingkungan eksternal dan internal organisasi. Faktor-faktor eksternal yang dapat menimbulkan adanya peluang atau ancaman bagi organisasi terdiri atas: keadaan pasar, persaingan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan peraturan. Sedangkan faktor-faktor internal menunjukkan adanya keunggulan atau kelemahan organisasi, meliputi: keuangan, produksi, SDM, serta khususnya bidang pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Analisis tersebut merupakan penilaian apakah strategi pemasaran yang telah ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan keadaan pada saat ini. Hasil penilaian tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan apakah strategi yang sedang dijalankan perlu

diubah serta untuk menyusun atau menentukan strategi yang akan dijalankan di masa mendatang. Praktek pemasaran pada sekolah, termasuk sekolah dasar, sekolah menengah, sekolah negeri, dan sekolah swasta, yang beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif sebagai berikut:

- a. Produk, yaitu fasilitas dan pelayanan yang ditawarkan oleh sekolah. Meskipun sekolah yang sangat giat dalam menawarkan produk atau pelayanan yang berkualitas, namun sejumlah masalah masih dapat ditemukan, seperti:
 - 1) Kurangnya pertimbangan pada ragam penawaran. Sebagian besar sekolah cenderung memberikan terlalu banyak penawaran. Sekolah seharusnya melakukan spesialisasi pada suatu hal tertentu.
 - 2) Adanya kebutuhan untuk melihat pelajaran, yakni keuntungan apa yang akan didapatkan pelanggan (siswa) daripada hanya memberikan gambaran umum tentang kandungan materi yang ada dalam pelajaran tersebut.
 - 3) Adanya kebutuhan untuk memastikan bahwa kualitas dilihat dalam arti terpenuhinya kebutuhan pelanggan daripada kualitas pelajaran itu sendiri.
 - 4) Hanya ada sedikit perhatian pada “potensi hidup” dari pelajaran tersebut.
- b. Harga, yaitu pembiayaan (*costing*) yang membandingkan pengeluaran dengan keuntungan yang didapat pelanggan, serta penetapan harga (*pricing*) atau harga yang dikenakan kepada pelanggan. Hal ini terlihat jelas pada sekolah swasta karena pilihan pasar sangat terbuka untuk calon orangtua, yaitu antara “sekolah swasta yang mahal” dan “sekolah negeri yang bagus dan gratis”. Akan tetapi, hal ini adalah persoalan penting bagi sekolah negeri karena:
 - 1) Proses perekrutan siswa mengarah kepada tambahan dana dari pemerintah.
 - 2) Dukungan dana sponsor dari anggota komunitas pebisnis lokal.
 - 3) Biaya yang dikenakan dan sumbangan orang tua untuk fasilitas tambahan dan aktivitas ekstra kurikuler.
- c. Lokasi, yaitu kemudahan akses dan penampilan serta kondisinya secara keseluruhan. Ketika sekolah memperhatikan masalah penampilan (misalnya melalui dekorasi, tampilan, dan ucapan selamat datang kepada pengunjung), maka akan semakin berkurangnya perhatian yang diberikan kepada masalah akses (seperti parkir untuk pengunjung, akses bagi penyandang cacat,

- konsultasi di luar sekolah, dan mesin penjawab telepon).
- d. Promosi, yaitu kemampuan mengkomunikasikan manfaat yang didapat dari organisasi bagi para pelanggan potensial.
 - e. Orang, yaitu orang yang terlibat dalam menyediakan jasa. Masalahnya adalah tidak semua karyawan sekolah menyampaikan pesan yang sama kepada orang tua dan kelompok lain di luar sekolah. Hal ini terkait dengan budaya sekolah yang tidak sepenuhnya mengambil pendekatan yang berorientasi pada pasar.
 - f. Proses, yaitu sistem operasional untuk mengatur pemasaran, dengan implikasi yang jelas terhadap penempatan karyawan sekolah dalam hal pembagian tanggung jawab untuk mengkoordinasikan dan mencari sumber daya bagi strategi pemasaran sekolah.
 - g. Bukti Fisik, yaitu bukti yang menunjukkan bahwa pelanggan akan mendapatkan manfaat sehingga memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan dan evaluasi (seperti hasil ujian). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sekolah tidak dapat mengemukakan aspek-aspek apa saja dari tindakan mereka yang menunjukkan bukti dari manfaat pelayanan yang diberikan kepada pelanggan.

Penekanan utamanya terpusat pada produk sekolah. Sekolah masih belum menetapkan strategi jangka panjang karena sebagian besar

kebijakan sekolah dalam bentuk strategi jangka pendek yang tidak terencana serta reaktif (manajemen krisis sebagai respon terhadap menurunnya peran dan meningkatnya persaingan setempat). Banyak sekolah belum melakukan pengamatan pasar dengan menggunakan riset dan analisis pasar yang sistematis. Sekolah lebih menyukai strategi pasar tunggal, yang memberikan “semua hal bagi semua siswa yang potensial” daripada menekankan adanya perbedaan dan penyediaan khusus sebagai salah satu cara untuk menangkap potensi pasar. Pada saat yang sama, sekolah menghindari persaingan yang tidak berguna dan mempromosikan kerjasama dengan penyedia lokal lainnya.

Aspek-Aspek yang Memunculkan “Komersialisasi” Pendidikan

a. Aspek Politik

Pendidikan yang merupakan kebutuhan dasar manusia dan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia juga memiliki aspek politik karena dalam pengelolaan harus berdasarkan ideologi yang dianut negara. Adapun ideologi pendidikan kita adalah ideologi demokrasi Pancasila, yaitu setiap warga negara mendapat kebebasan dan hak yang sama dalam mendapat pendidikan. Dalam Pembukaan UUD 45 pada alinea ke-4, hal ini pun tercermin ada kalimat mencerdaskan kehidupan bangsa. Atas dasar itu sudah seharusnya pemerintah

dalam menetapkan setiap kebijakan pendidikan merujuk pada ideologi negara. Akibatnya muncul tempat-tempat pendidikan dengan biaya mahal dan tidak terjangkau oleh golongan ekonomi lemah, sehingga hak masyarakat untuk mendapatkan hak yang sama memperoleh pendidikan jauh dari kenyataan.

Tanpa disadari dunia pendidikan kita yang berlandaskan Pancasila telah masuk ke dalam mesin giling ideologi kapitalisme yang lumat dalam mekanisme pasar serta kurang menghiraukan kaum lemah, malahan menjadi komoditas yang sangat mahal nilainya. Kuasa uang begitu mudah memasuki arena pendidikan kita yang mengalahkan moralitas pendidikan itu sendiri. Diakui pendidikan membutuhkan uang tetapi uang bukanlah segala-galanya untuk meraih pendidikan atas kondisi yang demikian, strata sosial, harkat dan martabat mereka tetap berada di bawah.

Apabila pendidikan tetap mahal dan dikomersialisasikan, masyarakat yang kurang mampu tidak akan dapat meningkatkan status sosial mereka, dan ironisnya komersialisasi pendidikan ini didukung oleh tatanan sosial dan diterima oleh masyarakat.

Akibat longgarnya sanksi sosial dan kurangnya kontrol

pemerintah, komersialisasi pendidikan tumbuh subur serta membentuk social gap atau diskriminasi dalam pendidikan antara masyarakat yang mampu dengan yang tidak mampu.

b. Aspek Budaya

Budaya bangsa kita mengagungkan gelar akademis dan sebagai contoh dihampir setiap dinding rumah yang keluarganya berpendidikan selalu terpajang foto wisuda anggota keluarga lulusan dari universitas manapun. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa kita masih menganut budaya yang degree minded. Budaya berburu gelar ini berkembang pada lembaga pemerintah yang mengangkat atau mempromosikan pegawai yang memiliki gelar sarjana tanpa terlebih dahulu diteliti dan dites kemampuan akademik mereka.

Ironisnya program pendidikan seperti ini banyak diminati oleh banyak orang. Dengan komersialisasi pendidikan berarti ideologi kapitalisme telah masuk dalam pendidikan. Ideologi ini memberikan kebebasan pada individu atau kelompok untuk berusaha, sementara intervensi pemerintah harus berkurang. Akibat masuknya ideologi ini akan dapat menggeser pendidikan demokrasi Pancasila kalau pemerintah tidak cepat tanggap dalam hal ini.

- c. Aspek Ekonomi
Ekonomi sudah pasti kita akan membicarakan aspek ekonomi terkait dengan masalah biaya. Biaya pendidikan nasional seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya sekolah khususnya SPP dibebankan kepada masyarakat. Menyediakan sekolah dengan biaya mahal dan bertaraf internasional berarti telah menarik masyarakat yang mempunyai kemampuan dalam finansial untuk menyekolahkan anak mereka di dalam sekolah yang mahal tersebut.
- d. Aspek Sosial
Aspek sosial terkait dengan dari hubungan dengan manusia. Pendidikan sangat menentukan perubahan strata sosial seseorang, yaitu semakin tinggi pendidikan seseorang, akan semakin meningkat pula strata sosialnya, begitu juga sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Kartono yang menyatakan: tingginya tingkat pendidikan dan tingginya taraf kebudayaan rakyat akan menjadi barometer bagi pertumbuhan bangsa dan negara yang bersangkutan (Kartono, 1999: 20). Akan tetapi bagaimana orang dapat, mencapai pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tersebut mahal dan hanya dapat dinikmati oleh masyarakat golongan ekonomi mapan saja. Bagaimana dengan masyarakat golongan ekonomi lemah? Berapa banyak

penduduk Indonesia yang tidak dapat melanjutkan pendidikan karena kekurangan biaya. 80% wilayah Indonesia terdiri dari desa yang sebagian besar penduduknya tidak mampu untuk bersekolah tinggi, dan rata-rata pendidikan mereka hanya tingkat SD dan SLTP. Hal ini tentu akan membuat nasib mereka makin terpuruk. Kendala yang dihadapi dalam dunia pendidikan kita saat ini tak lain disebabkan oleh beberapa hal yang sangat urgen dan sangat mendasar bagi masyarakat seperti tinggi biaya pendidikan.

Monopoli Pendidikan vs Pendidikan Kritis

Di dalam dunia akademik, pendidikan kritis mempunyai banyak label. Di antara istilah-istilah yang dimunculkan adalah “*pedagogy of critique and possibility*”, “*pedagogy of student voice*”, “*pedagogy of empowerment*”, “*radical pedagogy*”, “*pedagogy for radical democracy*”, dan “*pedagogy of possibility*”, “*critical pedagogy*”, atau “*transformative pedagogy*” (<http://fcis.oise.utoronto.ca>: 2016). Mereka memiliki kemampuan untuk mengubah (transform) dan melawan secara radikal, sehingga secara kritis tidak menyerah terhadap jebakan struktural yang ada. Jadi, di sini ketiga terminologi (*critical pedagogy*, *transformative pedagogy* dan atau *radical pedagogy*) ini dipahami secara sama dan sinonim.

Untuk itu, istilah pendidikan kritis yang digunakan dalam tulisan ini merupakan alih bahasa dari terminologi *critical pedagogy*, *transformative pedagogy* dan atau *radical pedagogy*. Apa itu pendidikan kritis? Menurut Lankshear dkk., pendidikan kritis yang dikembangkan Freire, melalui berbagai karyanya, merupakan suatu konsep umum tentang *critical practice* di dalam dan sekitar pendidikan. Konsep ini mencakup kajian yang lebih luas mengenai struktur dan relasi pendidikan, yang menjadi dasar bagi pembentukan kehidupan masyarakat secara luas (Lankshear, 1996: 150). Karena pendidikan kritis memiliki wilayah yang lebih luas mengenai struktur dan relasi pendidikan dalam masyarakat, pendidikan kritis sering dipandang sebagai konsep yang bergelut dalam dua wilayah; teoritis dan praksis, atau dalam bahasa David Glass, berada dalam level politis dan level kelas (David Glass, 2001: 15-16). Akan tetapi, karena pendidikan kritis menghendaki adanya pertautan antara teori dan praktis, maka berbagai pengertian yang dikemukakan para pakar bidang ini tak jarang selalu mempertautkan antara keduanya.

Pendidikan kritis pada intinya berupaya memberikan kesempatan dan kebebasan bagi para individu untuk menentukan masa depannya sendiri. Inilah yang dimaksud Freire bahwa pendidikan merupakan praktik pembebasan (*education as the practice of freedom*). Di dalam konsep ini,

pedagogi Friereian sering memaknai pendidikan sebagai:

One place where the individual and society are constructed, a social action which can either empower or domesticate students. In the liberating classroom suggested by Freire's ideas, teacher pose problems derived from student life, social issues, and academic subject, in a mutually created dialogue. This pedagogy challenges teachers and students to empower themselves for social change, to advance democracy and equality as they advance their literacy and knowledge (Shor, 2001: 25).

Dengan makna pendidikan seperti itu, pendidikan kritis bagi Freire adalah: Suatu bentuk pedagogi yang harus diolah bersama, bukan untuk, the oppressed (sebagai individu maupun anggota masyarakat secara keseluruhan) dalam perjuangan tanpa henti untuk merebut kembali kemanusiaan. Pedagogi ini menjadikan penindasan dan sebab-sebabnya sebagai bahan refleksi bagi the oppressed, dan dari refleksi ini akan lahir perlunya terlibat dalam perjuangan bagi kebebasannya.

Dalam perjuangan itu pedagogi akan dibuat dan diperbaiki. Permasalahannya, bagaimanakah kaum tertindas (the oppressed) dapat membangun dan menyusun sebuah pendidikan kritis? Bagi Freire, hanya jika kaum tertindas mampu menemukan diri mereka sendiri dengan menjadi "pelayan-pelayan" (*hosts*) bagi kaum penindas (*the*

oppressor), maka mereka baru dapat menyumbangkan sesuatu bagi proses penciptaan pendidikan kritis yang memebaskan. Pendidikan kritis adalah sebuah perangkat agar kaum tertindas mengetahui secara kritis bahwa diri mereka sendiri dan kaum penindasnya merupakan wujud dehumanisasi.

Oleh karena itu, bagi Freire, kelahiran kaum tertindas yang kritis merupakan rasa sakit seperti seorang ibu melahirkan anaknya. Mereka lahir bukan untuk menjadi kaum penindas atau kaum tertindas, tetapi menjadi manusia yang berada dalam proses pembebasan. Mereka adalah kekuatan penggerak (*motivating force*) bagi aksi pembebasan, dan bukan menjadi antitesa bagi kaum penindas, karena mereka tak akan ada tanpa adanya kaum penindas. Mereka dapat mengatasi dan menyusun pendidikan kritis jika mereka mampu memunculkan pengetahuan kritis yang dapat mendorong mereka membebaskan diri, bukan dengan menundukkan kaum penindas.

Dengan kata lain, kaum tertindas mengemban tugas untuk berjuang mencapai kebebasannya melalui praksis (*praxis*), yaitu refleksi (*reflection*) dan tindakan (*action*) atas dunia untuk mengubahnya. Oleh karena pendidikan kritis, sebagaimana ditekankan Freire, mengisukan pembebasan dan pemberdayaan melalui praksis, maka tak heran kalau Lankshear dkk. menyebutkan bahwa “*the theme of empowerment is central to conceptions of critical pedagogy*”.

Dengan tema ini, pendidikan kritis berangkat dari kerangka bahwa individu dan masyarakat menciptakan dirinya sendiri secara dialektik. Pendidikan kritis harus mampu merelasikan pertumbuhan pribadi dengan kehidupan publik, yang dilakukan melalui pengembangan skill yang kuat, pengetahuan akademik, kebiasaan penelitian dan keingintahuan yang kritis tentang masyarakat, kuasa dan persamaan.

Dari sini, Peter McLaren berargumen bahwa sasaran pendidikan kritis adalah memberdayakan kaum lemah (*the powerless*) serta mengalahkan ketidaksamaan dan ketidakadilan. Pendidikan kritis menolak sekolah-sekolah yang mendukung kuasa dominan dan memelihara ketidaksamaan, bahkan pendidikan kritis mengharapkan sekolah sebagai agen, yang mana pemberdayaan individu dan masyarakat dapat ditingkatkan. Oleh karenanya, sama dengan Friere, pendidikan kritis bagi McLaren secara pasti merupakan pendidikan yang memiliki komitmen terhadap kaum tertindas (*the oppressed*) (Craver, 1995: 375).

Sementara itu, Henry A. Giroux menekankan bahwa pendidikan kritis adalah “*a project informed by a political vision*”, yaitu adanya hubungan antara pedagogi dan politik yang mengkonsepsikan bahwa setiap praktik pendidikan mensyaratkan bentukbentuk relasi sosial, yang mana bentuk-bentuk otoritas, nilai-nilai dan berbagai pertimbangan etis secara

konstan diperdebatkan dalam rangka menyediakan kondisi yang dapat mengembangkan format-format demokrasi bagi agen politik dan agen sosial. Dari sinilah Giroux menyebutkan bahwa “pedagogy in the critical sense illuminates the relationship among knowledge, authority, and power”.

Pada sisi yang lain, Michael W. Apple memandang bahwa krisis struktural, baik yang menyangkut kerja, budaya maupun legitimasi, sesungguhnya dimulai dari sekolah. Sekolah selama beberapa dekade terakhir ini telah menjadi pusat kecaman radikal ketimbang institusi-institusi lainnya semisal politik, budaya atau ekonomi. Kecaman terhadap dunia pendidikan ini terus meningkat ketika institusi pendidikan tidak mampu lagi melahirkan demokrasi dan persamaan yang diinginkan.

Dari sini para pemikir pendidikan kritis mempertanyakan kembali peran penting sekolah dan pengetahuan yang dihasilkannya di dalam mereproduksi tatanan sosial yang sering menyisakan ketidaksamaan kelas, gender dan ras. Mereka umumnya sepakat bahwa sistem pendidikan dan budaya merupakan elemen penting di dalam memelihara adanya relasi dominasi dan eksploitasi di dalam masyarakat. Para pendukung teori kritis ini menyatakan bahwa sekolah perlu mendapat perhatian lebih ketika institusi ini menjadi bagian dari kerangka relasi sosial yang

berhubungan dengan reproduksi budaya (Apple, 1985: 9-10).

Oleh karena sekolah merupakan bagian dari reproduksi budaya, Apple menekankan bahwa studi kritis tentang pendidikan bukan hanya berkaitan dengan isuisu teknis tentang bagaimana mengajar secara efektif dan efisien, tapi lebih dari itu pendidikan kritis harus mengkaji bagaimana hubungan pendidikan dengan ekonomi, politik dan budaya yang di dalamnya mengandung unsur kuasa. Kajian pendidikan kritis seperti ini meniscayakan perlunya *critical theoretical tools* dan *cultural and political analyses* untuk dapat memahami fungsi-fungsi kurikulum dan pengajaran secara lebih terang. Alat-alat analisis ini, bagi Apple, bertumpu pada dua konsep utama, yaitu ideologi dan hegemoni, yang untuk beberapa lama telah diabaikan dalam studi kependidikan di dunia Barat (Apple, 2004: 7).

Melalui analisis seperti ini, Apple menyatakan bahwa pendidikan bukanlah sebuah kegiatan usaha yang netral (*education is not a neutral enterprise*). Pendidik, secara sadar atau tidak, sebenarnya telah terlibat dalam sebuah tindakan politik (*a political act*). Oleh karena itu, senada dengan Giroux, Apple berusaha menganalisa dan memahami pendidikan kritis dari segi hubungannya dengan struktur ekonomi, dan dalam koneksi antara *knowledge and power*.

Kesimpulan

Seperti yang telah disebutkan, bahwa monopoli dapat diartikan sebagai suatu keistimewaan (hak istimewa) atau keuntungan tertentu yang didapat oleh satu atau lebih orang atau perusahaan, karena adanya hak eksklusif (atau kekuasaan) untuk menjalankan suatu bidang usaha tertentu atau perdagangan, menghasilkan barang atau jasa tertentu, atau mengendalikan penjualan keseluruhan produksi atau komoditas barang atau jasa tertentu.

Faktor-faktor eksternal yang dapat menimbulkan adanya peluang atau ancaman bagi organisasi terdiri atas: keadaan pasar, persaingan, teknologi, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan peraturan. Sedangkan faktor-faktor internal menunjukkan adanya keunggulan atau kelemahan organisasi, meliputi: keuangan, produksi, SDM, serta khususnya bidang pemasaran yang terdiri dari produk, harga, distribusi, dan promosi. Selain daripada monopoli, terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi komersialisasi pendidikan diantaranya; aspek politik, aspek budaya, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dengan adanya monopoli pendidikan maka mengakibatkan ideologi kapitalisme mulai merebak di dalam dunia pendidikan yang pada akhirnya lebih mengutamakan keuntungan bagi pihak-pihak tertentu saja.

Daftar Pustaka

- Apple, Michael W. (1985). *Education and Power*. Boston: Ark Paperbacks.
- Apple, Michael W. (2004). *Ideology dan Curriculum*. Edisi III; New York: RoutledgeFalmer.
- Garner, Bryan A. (1999). *Blacks Law Dictionary*. Seven Edition st Paul Minn. NewYork: West Group.
- Glass, Ronald David. (2001). *On Paulo Freire's Philosophy of Praxis and the Foundations of Liberation Education*, Educational Researcher.
- Kartono, Kartini. (1997). *Tinjauan Politik Mengenai Sistem Pendidikan Nasional* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Lankshear, Colin dkk. (1996). *Critical Pedagogy and Cyberspace* dalam Henry A. Giroux dkk. *Counternarratives: Cultural Studies and Critical Pedagogies in Postmodern Spaces*. New York: Routledge.
- Lee, Ena dan Caterina Reitano. (2016). *A Critical Pedagogy Approach: Incorporating Technology to De/Reconstruct Culture in the Language Classroom*”.
- Margono, Suyud. (2009). *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta:Sinar Grafika.
- Ozmon, Howard dan Samuel M. Craver. (1995). *Philosophical Foundations of Education*

Edisi V. New Jersey: Prentice-Hall.

Shor, Ira. (2001). *Education is Politics: Paulo Freire's Critical Pedagogy* dalam Peter McLaren dan Peter Leonard (eds.), *Paulo Freire: a Critical Encounter*. London: Routledge.